

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an al- Karim

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV.

Penerbit Jumanatul Ali, 2005.

2. Buku dan Jurnal

Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1983. hal. 71.

Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. cet. 2, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004. hal. 107.

Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama, 2012. hal. 59.

Arden, Andrew. *Local Government Constitutional Law and Administrative Law*. London: Thompson Sweet&Maxwell, 2008. hal. 84.

Ariyanto, Bambang. "Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19". *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*. Edisi Khusus. Oktober 2020. pp. 37 – 57.

Aziz, Abdul. *Adab dan Akhlak Islam berdasarkan alquran dan sunnah [Munataqa al Adab asy-Syar'iyah]*, Diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet 2, (Jakarta: Darul Haq, 2015) hal. 371.

Damen, L.J.A. *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, handhaving*. BJU Boom Juridische Uitgevers, Tweede Druk, Den Haag, 2005, hal. 57.

Djoyonegoro, N. "Perang Global Melawan Corona: Perspektif Intelijen". Yayasan Insan Waskita Nusantara, 2020.

Efendi, Joendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. cet.2. Jakarta: Kencana divisi dari Prenadamedia Group, 2018.

Evandy, Aristo. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum", *Fiat Justisia Journal Of Law*: vol. 10, issue. 4, Oktober-Desember 2016, hal. 608.

Handayani, Diah. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40, No. 2, April 2020. hal. 120.

Hasrul, M. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". *Jurnal Unhas*, 2020. 3(2), 385–398.

Hayat. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing, 2018. hal. 11-12.

- Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Keimplementasi*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2016. hal. 43.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi Jakarta Rajawali pers, 2016.
- Irvina, Bunga., Untung Dwi, Fifiian W. “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai perwujudan Fungsi wakil Pemerintah Pusat di daerah dan kepala daerah Provinsi Jawa Tengah”. *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, No. 3, 2016, hal. 6.
- Luankali, Bernadus. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung: Amelia Press, 2007. hal. 84.
- Lukman, Marcus. “Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1996. hal. 191-192
- Manan, Bagir. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hal. 234.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986. hal.40
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa’at Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2018. hal. 26.
- Mustofa, Lutfi. “Penarikan Pajak Pada Saat Pandemi Virus Corona Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam”. *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2 No. 01 Januari – Juni 2021 e-ISSN: 2722-192X. hal. 99.
- Parwanto, MLE. “Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19”. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*. Vol. 3. No. 1. Maret 2020. hal.1.
- Qudsy, Saifudin Zuhri dan Ahmad Sholahudin. “Kredibilitas Hadis dalam COVID-19: Studi atas Baṣṭ al-Mā’ūn fī Fadḥli al-Thāun karya Ibnu Hajar al-Asqalany”. *Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 4. Nomor 1, 2020.
- Ridho, Muhammad Rasyid. ”Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan Relevansinya dengan Covid-19”. *Jurnal: Sejarah Peradaban Islam* Vol. 4. No. 1. Juli 2020. hal. 26
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Jakarta: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019.
- Sedubun, Victor Juzuf. “Pembentukan Produk Hukum Daerah Selama Pandemi Covid-19”. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*. Edisi Khusus. Oktober 2020. pp. 1 – 20
- Shahih: HR. Bukhâri (no. 2442 dan 6951), Muslim (no. 2580) dan Ahmad (2/91), Abu Dâwud (no. 4893), at-Tirmidzi (no. 1426), dan Ibnu Hibbân (no. 533) dari Shahabat Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma.

- Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: PT. Karya Unipress, 1994. hal.19
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007. hal. 233.
- _____. *Materi pokok ilmu Perundang-undangan HKUM 4403*, cet 1, ed.1. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015. hal. 55.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006. hal. 54.
- Supriyatna, Eman. "Wabah Coronavirus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam". *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 6. 2020 hal. 561.
- Syafrudin, Ateng. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju, 1991. hal.19-22.
- Yuliana, "Corona virus disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur", *Wellness and healthy magazine*, vol. 2, No. 1, Februari 2020, hal.187.

3. Peraturan dan Keputusan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, UU Nomor 25 tahun 2004.
- _____. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor . 82, TLN Nomor 5234.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU nomor 23 tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekarantinaan Kesehatan*, UU Nomor 6 tahun 2018. LN Tahun 2018 Nomor 128. TLN Nomor 6263.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. PP Nomor 21 Tahun 2020. LN Tahun 2020 Nomor 91. TLN 6487.
- _____. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.
- _____. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan*

Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021.

_____.*Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Inmendagri Nomor 4 Tahun 2021.*

_____.*Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Inmendagri Nomor 5 Tahun 2021.*

_____.*Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Inmendagri Nomor 6 Tahun 2021.*

_____.*Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pergub Nomor 33 Tahun 2020. BD Tahun 2020 Nomor 55003.*

_____.*Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif. Pergub nomor 51 tahun 2020. BD Tahun 2020 Nomor 72014.*

_____.*Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif. Pergub nomor 80 tahun 2020. BD Tahun 2020 Nomor 72024.*

_____.*Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pergub nomor 88 tahun 2020. BD Tahun 2020 Nomor 75012.*

_____.*Peraturan Gubernur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pergub Nomor 3 tahun 2021. BD Tahun 2021 Nomor 62002.*

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam*

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SK-Gub Nomor 380 Tahun 2020.

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SK-Gub Nomor 412 Tahun 2020.*

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SK-Gub Nomor 489 Tahun 2020.*

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. SK-Gub Nomor 563 Tahun 2020.*

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. SK-Gub Nomor 647 Tahun 2020.*

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. SK-Gub Nomor 735 Tahun 2020.*

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. SK-Gub Nomor 805 Tahun 2020.*

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. SK-Gub Nomor 853 Tahun 2020.*

_____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. SK-Gub Nomor 879 Tahun 2020.*

- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SK-Gub Nomor 959 Tahun 2020.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif. SK-Gub Nomor 1020 Tahun 2020.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif. SK-Gub Nomor 1100 Tahun 2020.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif. SK-Gub Nomor 1193 Tahun 2020.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif. SK-Gub Nomor 1295 Tahun 2020.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu Dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar. SK-GUB Nomor 19 Tahun 2021.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Jangka Waktu Dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar. SK-GUB Nomor 19 Tahun 2021.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. SK-GUB Nomor 107 Tahun 2021.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. SK-GUB Nomor 172 Tahun 2021.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. SK-GUB Nomor 213 Tahun 2021.*
- _____.*Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro. SK-GUB Nomor 294 Tahun 2021.*

4. Internet

- Achmad Reyhan Dwianto. “DKI Cabut 'Rem Darurat', Pakar Sebut PSBB Ketat dan Transisi Tak Berbeda”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5209189/dki-cabut-rem-darurat-pakar-sebut-psbb-ketat-dan-transisi-tak-berbeda>. Diakses pada 4 Mei 2021.
- Akurat.co. “5 Hadis Nabi Tentang Wabah dan Penyakit Menular”. <https://akurat.co/rahmah/id-1247763-read-5-hadis-nabi-tentang-wabah-dan-penyakit-menular?page=2>. Diakses pada 8 Februari 2021.
- Allianz Indonesia. “Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada COVID-19”. <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490>. Diakses pada tanggal 13 April 2021.
- Detiknews. “Jokowi Soroti Puncak Bogor Makin Ramai di Tengah Pandemi Corona”. <https://news.detik.com/berita/d-4946333/jokowi-soroti-puncak-bogor-makin-ramai-di-tengah-pandemi-corona?single=1>. Diakses pada 8 Februari 2021.
- Endri Kurniawati. “Gubernur Anies Baswedan Cabut PSBB Transisi Jakarta”. <https://metro.tempo.co/read/1421587/gubernur-anies-baswedan-cabut-psbb-transisi-jakarta/full&view=ok>. Diakses pada 4 Mei 2021.
- Hadijah Alaydrus. “Masa Darurat Covid-19: Bukan PSBB tapi PPKM. Ini Penjelasan dari Pemerintah”. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210107/15/1339825/masa-darurat-covid-19-bukan-psbb-tapi-ppkm-ini-penjelasan-dari-pemerintah>. Diakses pada 4 Mei 2021.
- Ikrar Amin. “PSBB Ketat DKI Jakarta Dicabut, Masuki Masa PSBB Transisi”. <https://bogor.pojoksatu.id/baca/psbb-ketat-dki-jakarta-dicabut-masuki-masa-psbb-transisi>. Diakses pada 4 Mei 2021.
- Jawapos.com. “Anies Perketat PSBB di Jakarta, Ini Daftar Lengkap Perubahan Kebijakan”. <https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/01/2021/anies-perketat-psbb-di-jakarta-ini-daftar-lengkap-perubahan-kebijakan/>. Diakses pada 7 Februari 2021.
- Jogloabang. “Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19”. <https://www.jogloabang.com/kesehatan/permenkes-9-2020-pedoman-psbb-rangka-percepatan-penanganan-covid-19>. Diakses pada 8 Februari 2021.
- Joni. “Antara Tho'un dan Virus Korona”. <https://koranpelita.com/2020/03/27/antara-thoun-dan-virus-korona/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021.
- Kompas.com. “Diperpanjang Lagi, Berikut Perjalanan PSBB di Jakarta”. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/07/190200765/diperpanjang->

lagi-berikut-perjalanan-psbb-di-jakarta?page=all. Diakses pada 7 Februari 2021.

Kompas.com. “Perjalanan PSBB Transisi di Jakarta hingga Anies Tarik Rem Darurat...”.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/11/190300865/perjalanan-psbb-transisi-di-jakarta-hingga-anies-tarik-rem-darurat-?page=all>. Diakses pada 3 Mei 2021.

Kompas.com. “PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya dengan PPKM?”.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/060200565/ppkm-mikro-berlaku-apa-bedanya-dengan-ppkm-?page=all#:~:text=Kini%2C%20istilah%20yang%20digunakan%20adalah,skala%20mikro%20atau%20PPKM%20mikro.&text=Pada%20PPKM%20berbasis%20mikro%2C%20ada,dalam%20rangka%20pengendalian%20Covid%2D19>. Diakses pada 4 Mei 2021.

Kompas.com. “PSBB Transisi di Jakarta, Apa Arti dan Bagaimana Protokolnya?”.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/05/10170871/psbb-transisi-di-jakarta-apa-arti-dan-bagaimana-protokolnya?page=all>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2021.

Kumparan. “Perbedaan Pelaksanaan PSBB, PSBB Transisi hingga PSBB Ketat di Jakarta”.
<https://kumparan.com/kumparannews/perbedaan-pelaksanaan-psbb-psbb-transisi-hingga-psbb-ketat-di-jakarta-1uC2P8dFznL/full>. Diakses pada 7 Februari 2021.

Liputan 6. “Pergub Dicabut, Pemprov DKI Jakarta Resmi Tiadakan SIKM”.
<https://www.liputan6.com/news/read/4308011/pergub-dicabut-pemprov-dki-jakarta-resmi-tiadakan-sikm#:~:text=%22Pergub%20Nomor%2060%20Tahun%202020,17%2F7%2F2020>). Diakses pada 8 Februari 2021.

Lizsa Egeham. “PSBB Ketat di DKI Mulai Diberlakukan Senin 11 Januari”.
<https://www.liputan6.com/news/read/4453863/psbb-ketat-di-dki-mulai-diberlakukan-senin-11-januari#:~:text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Gubernur,pada%2011%2D25%20Januari%202021>. Diakses pada 4 Mei 2021.

Merdeka.com. “Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona di Indonesia”.
<https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html?page=all>. Diakses pada 7 Februari 2021.

Muhammad Abduh Tuasikal. “Di Rumah Saja Saat Wabah Tetap Dapat Pahala Syahid”.
<https://rumaysho.com/23663-di-rumah-saja-saat-wabah-tetap-dapat-pahala-syahid.html>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

Nyoman Ary Wahyudi. “PSBB Ketat Berlaku Lagi di DKI Jakarta, Ini Alasan Gubernur Anies”.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200913/15/1290939/psbb-ketat-berlaku-lagi-di-dki-jakarta-ini-alasan-gubernur-anies>. Diakses pada 3 Mei 2021.

Republika. “Ini Daftar Hadist Shahih dan Dha’if tentang Wabah Covid-19”.
<https://republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/ini-daftar-hadist-shahih-dan-dhaiftentang-wabah-covid19>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

Risalah Muslim. “HR. Bukhari: 157 – Tentang Anjuran Mencuci Tangan Saat Bangun Tidur”. <https://risalahmuslim.id/anjuran-mencuci-tangan-saat-bangun-tidur/>. Diakses pada 7 Mei 2021.

Satuan Tugas Penanganan COVID 19. “Tanya Jawab”.
<https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>. Diakses pada tanggal 13 April 2021.

Siti Afifiyah. “Pandemi Corona dan Kisah Wabah Penyakit Zaman Nabi”.
<https://www.tagar.id/pandemi-corona-dan-kisah-wabah-penyakit-zaman-nabi>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

Stop Pneumonia. “Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)”.
<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>. Diakses pada 7 Februari 2021.

Wartaekonomi. “Apa itu Pandemi?”.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi>. Diakses pada tanggal 13 April 2021.

Yonada Nancy. “Apa Arti PPKM dan Bedanya dengan PSBB Jawa Bali 11-25 Januari?”. <https://tirto.id/apa-arti-ppkm-dan-bedanya-dengan-psbb-jawa-bali-11-25-januari-f8VN>. Diakses pada 4 Mei 2021.